

**PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDAPATAN KABUPATEN
BOJONEGORO SEBELUM DAN SESUDAH PEMEKARAN WILAYAH**

Siti Ummi Sholihah

S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya

Email: ummisholihah19@yahoo.co.id

Abstract: Bojonegoro become a city known for the presence of oil mining in the district. Bojonegoro District is fairly extensive district with 27 sub-districts including new sub-districts formed the District Gayam. Of the expansion of the mining area and the existing oil is expected to occur both in terms of the development of economic, social and political. From an economic point of the economic situation of a region can be seen from the Gross Domestic Product (GDP) District. Of these two phenomena, namely expansion area and the presence of the oil to see how economic growth and revenue Bojonegoro.

This study used a qualitative research by analyzing and describing the data obtained in the form of GDP Bojonegoro, Bojonegoro total revenue by observing certain sources of revenue and revenue from the district and sub-district related to the state of the economy before and after the expansion area. From the research that has been done, the regional growth is not significant effect on economic growth is evident from the amount of GDP and total revenue Bojonegoro. Redistricting only adds to the doorway money for Kabupten Bojonegoro.

Keywords : Expansion of the region , Gross Domestic Product , Local Revenue

PENDAHULUAN

Salah satu alasan manusia dikatakan sebagai penduduk adalah karena manusia bertempat tinggal pada suatu wilayah. Wilayah sebagai tempat tinggal penduduk dimana penduduk adalah manusia yang selalu berkembang diharapkan juga selalu berkembang baik dari segi sarana dan prasarana maupun sosial budaya. Perkembangan suatu wilayah tersebut secara umum dapat dikatakan sebuah pembangunan. Hakikatnya pembangunan merupakan konsep dinamis yaitu

perubahan secara terus menerus pada setiap aspek kehidupan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Pembangunan suatu wilayah dikatakan berhasil dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai proses bagaimana suatu perekonomian berkembang secara terus menerus yang cenderung ke arah kenaikan. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maka dilihat dari kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Suatu wilayah dapat berkembang dengan baik apabila didukung dengan banyak kondisi yang ada pada wilayah tersebut. Kondisi tersebut antara lain berupa letak geografis, data demografi, dan kekayaan alam atau sumber-sumber alam yang diolah sehingga menghasilkan pendapatan asli wilayah tersebut. Wilayah dengan penduduk yang tinggi dan jumlah desa yang banyak akan mengakibatkan jauhnya rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan pada wilayah tersebut. Apabila kondisi tersebut terjadi maka pemerintahan dan perkembangan wilayah juga tidak terjadi secara maksimal dan berpengaruh kurang baik terhadap pembangunan sehingga banyak pilihan yang dapat dilakukan diantaranya adalah dengan pemekaran wilayah dengan tujuan mempercepat pembangunan pada wilayah tersebut.

Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro terletak Bujur Timur: 111,25' dan 112,09' serta Lintang Selatan: 6,59' dan 7,37'. Kabupaten Bojonegoro memiliki luas 230.706 Ha dengan jumlah penduduk sesuai dengan hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 sebesar 1.209.973 jiwa. Kepadatan penduduk di Kabupaten Bojonegoro mengalami kenaikan tiap tahunnya, namun laju pertumbuhan penduduk pelan-pelan mengalami

pelambatan, yaitu dari 1,64 persen ditahun 1990 dan terus menurun hingga terakhir menjadi 0,37 persen di tahun 2010.

Uraian data tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Bojonegoro termasuk memiliki wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang banyak. Dari sisi yang lain untuk data Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bojonegoro dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1

Produk Domestik Bruto Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008-2010 (angka)

No	Sektor/Sub Sektor	2008	2009	2010
1	Pertanian, peternakan, Kehut & Perikanan	1.901,81	2.032,71	2.148,86
2	Pertambangan dan Penggalian	1.450,96	1.808,36	2.317,25
3	Industri Pengolahan	503,42	531,37	587,33
4	Listrik & Air Bersih	48,08	50,89	53,293
5	Bangunan	225,62	244,35	270,64
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	1.156,63	1.218,19	1.311,24
7	Angkutan & Komunikasi	270,29	289,10	301,16
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Prsh	346,73	363,41	383,08
9	Jasa-Jasa	697,24	727,20	755,37
	PDRB Dengan Migas	6.660.791,54	7.267.525,09	8.128.233,06
	PDRB Tanpa Migas	5.243.229,10	5.558.265,85	5.916.99,23

Ulasan BPS terhadap tabel antara lain:

Secara umum dari tabel di atas didapatkan bahwa angka PDRB dari tahun ke tahun semakin meningkat, khususnya dari sektor pertambangan & penggalian. Jika ditelaah lebih lanjut antara perbandingan PDRB dengan migas dan tanpa migas didapatkan perbedaan yang signifikan. Artinya sektor ini sangat berperan dalam peningkatan PDRB Bojonegoro.

Selain dalam PDRB pertumbuhan yang meningkat terhadap sektor pertambangan dan penggalian juga ditampilkan pada data Laju Pertumbuhan Sektoral (persen) sebagai berikut:

Tabel 2

Produk Domestik Bruto Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008-2010 dalam Prosentasi

No	Sektor/Sub Sektor	2008	2009	2010
1	Pertanian, peternakan, Kehut & Perikanan	28,81	28,00	26,44
2	Pertambangan dan Penggalian	21,98	24,88	28,51
3	Industri Pengolahan	7,63	7,31	7,23
4	Listrik & Air Bersih	0,73	0,70	0,66
5	Bangunan	3,42	3,36	3,33
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	17,52	16,76	16,13
7	Angkutan & Komunikasi	4,09	3,98	3,71
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Prsh	5,25	5,00	4,71
9	Jasa-Jasa	10,56	10,01	9,29
	PDRB	10,24	10,10	11,84

Dengan penjelasan:

Secara umum, prosentasi dari laju pertumbuhan sektoral yang ada di Bojonegoro mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dengan turunnya angka di tahun 2009. Walaupun demikian, pada tahun 2010 kembali melesat. Jika dilakukan telaah lebih lanjut, sektor yang memberikan sumbangsih terbesar yakni pada sektor pertambangan dan penggalian, dibandingkan sektor lainnya.

Dari data BPS Kabupaten Bojonegoro tersebut menunjukkan dari tahun 2008 sampai tahun 2010 menunjukkan prosentase pertumbuhan PDRB mengalami penurunan dan kenaikan. Namun di sektor tertentu yaitu Pertambangan dan Penggalian mengalami kenaikan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010.

Pertambangan dan Penggalian yang ada di Kabupaten Bojonegoro tersebut berada di sekitar Kecamatan Ngasem dan Kecamatan Kalitidu yaitu sekitar Desa Gayam dan sekitarnya. Kabupaten Bojonegoro sebelumnya memiliki 27 kecamatan namun dengan pertimbangan permintaan masyarakat, jumlah penduduk dan banyak desa sebagaimana survei yang telah dilakukan oleh Pemerintah Bojonegoro dan *Research Centre for Conflict and Policy (RCCP)* FIA UB sehingga dengan Perda No 22 Tahun 2011 maka ditetapkan dibentuk Kecamatan Gayam.

Pembentukan Kecamatan Gayam berdasarkan Perda No 22 Tahun 2011 tersebut dilakukan dengan memisahkan beberapa desa dari Kecamatan Kalitidu dan Kecamatan Ngasem. Gayam sendiri sebelumnya adalah nama salah satu desa yang berada di Kecamatan Ngasem. Proyek eksplorasi dan eksploitasi minyak yang berpusat di Desa Gayam ini semakin meluas melawati kecamatan sekitarnya

yaitu Kecamatan Kalitidu dan Kecamatan Ngasem. Desa-desa di dua kecamatan area eksplorasi dan eksploitasi minyak ini sebelum terjadi pemekaran juga tergolong banyak yaitu di Kecamatan Kalitidu memiliki 24 desa sedangkan di Kecamatan Ngasem memiliki 23 desa. Sehingga dilakukan pembentukan Kecamatan Gayam. Namun jumlah desa yang ada pada masing-masing kecamatan ini bukan menjadi alasan utama pemekaran wilayah karena terdapat beberapa kecamatan yang memiliki jumlah desa yang lebih banyak seperti Kecamatan Sumberjo yang memiliki 26 desa. Pemekaran wilayah dilatarbelakangi berbagai alasan dan dengan survei yang matang.

Kecamatan Gayam terdiri atas enam desa dari Kecamatan Kalitidu yaitu Desa Manukan, Cengungklung, Sudu, Ngraho, Katur dan Beged. Dari Kecamatan Ngasem desa yang dilepas dan menjadi desa di Kecamatan Gayam adalah Desa Bonorejo, Brabohan, Mojodelik Ringintunggal, Begadon dan Beged. Hal ini seperti disampaikan pada Perda No 22 Tahun 2011 Pasal 2.

Pemekaran wilayah dan pertumbuhan ekonomi yang telah dibahas menimbulkan pemikiran bahwa terjadi hubungan diantara kedua variabel tersebut sehingga muncul pertanyaan bagaimana perbandingan pertumbuhan ekonomi dengan pendekatan pendapatan Kabupaten Bojonegoro sebelum dan sesudah terjadinya pemekaran Kecamatan Gayam?

Tujuan yang diinginkan adalah untuk mengetahui pengaruh pemekaran Kecamatan Gayam terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Bojonegoro.

Manfaat yang diharapkan adalah setelah mengetahui perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro sebelum dan sesudah pemekaran Kecamatan Gayam dapat dijadikan salah satu acuan evaluasi dan pembuatan

rencana pemerintahan baik pada Kabupaten Bojonegoro maupun Kecamatan Gayam.

KAJIAN PUSTAKA

Pertumbuhan Ekonomi

Istilah pertumbuhan ekonomi disimpulkan oleh Sukirno dalam Anggi (2006) antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan dalam pendapatan per kapita masyarakat yaitu tingkat pertumbuhan GDP pada tahun tertentu adalah melebihi tingkat pertumbuhan penduduk
2. Perkembangan GDP yang berlaku dalam suatu masyarakat diikuti oleh perbaikan dan modernisasi dalam struktur ekonominya yang umurnya masih bercorak tradisional. Sedangkan pertumbuhan ekonominya diartikan sebagai kenaikan dalam GDP tanpa memandang kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil daripada tingkat pertumbuhan penduduk.

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat dilihat dari beberapa indikator. Dalam indikator ekonomi, sebagaimana disampaikan oleh BPS bahwa pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat dilihat dengan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Anggi (2007) menyatakan bahwa PDRB merupakan jumlah nilai tambah (*value added*) yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Nilai suatu barang dalam perkembangan ekonomi saat ini dapat dinilai dari nilai wajar yang terus berubah dan perlu adanya penyesuaian nilai tersebut tetapi

juga tidak terlepas dari nilai perolehan barang tersebut. Sama halnya dengan perlakuan tersebut PDRB juga dapat diperhitungkan dengan dua macam harga yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. Dalam Anggi (2006) PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu waktu tertentu sebagai tahun dasar.

Banyak faktor yang mempengaruhi PDRB suatu wilayah misalnya sumber daya alam yang terkandung dalam wilayah tersebut dan dapat diolah, sumber daya manusia, letak geografis, sarana dan prasarana yang ada serta semua tidak dapat terlepas dari kebijakan pemerintah wilayah tersebut. Menurut Anggi (2006) dalam menghitung pendapatan regional, seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh berbagai sektor usaha yang melakukan usahanya disuatu wilayah dihitung tanpa memperhatikan kepemilikan atas faktor produksi.

Anggi (2006) menyatakan PDRB dari suatu daerah/wilayah lebih menunjukkan pada besaran produksi suatu daerah, bukan pendapatan yang sebenarnya diterima oleh penduduk di daerah yang bersangkutan. Namun walaupun demikian PDRB merupakan data yang paling representatif dalam menunjukkan pendapatan dibandingkan data yang lain. Sehingga data PDRB digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro dengan melihat pertimbangan penerimaan dari kecamatan yang ada di Kabupaten Bojonegoro.

Perhitungan pertumbuhan ekonomi menurut Sadono Sukirno (2011:50) adalah dari data pendapatan nasional riil yang tersedia. Formula yang akan digunakan untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi adalah:

$$g = \frac{PN_{riil1} - PN_{riil0}}{PN_{riil0}} \times 100$$

dimana g adalah tingkat pertumbuhan ekonomi yang dinyatakan dalam persen. PN_{riil1} adalah pendapatan nasional untuk tahun dimana tingkat pertumbuhan ekonominya dihitung dan PN_{riil0} adalah pendapatan nasional pada tahun sebelumnya.

Pemekaran Wilayah

Adanya otonomi daerah yang mulai diterapkan tahun 2001 telah menimbulkan perkembangan dalam pemerintahan daerah dimana salah satunya adalah munculnya pemekaran wilayah. Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa “Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih”. Sehingga pemekaran wilayah tidak hanya pembentukan daerah baru tetapi dapat dari penggabungan maupun pelepasan beberapa wilayah. Dalam Rachim 2013 menyebutkan kemudian bahwa dalam pemekaran wilayah yang lebih didefinisikan sebagai pembentukan daerah baru merupakan pembagian kewenangan administratif yang disertai dengan pelimpahan pembiayaan pembagian luas wilayah beserta potensi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dan jumlah penduduk. Tujuan pemekaran wilayah sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No 22 tahun

1999 dalam Rachim (2013) adalah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih baik.

Dalam pelaksanaannya, pemekaran wilayah dapat terjadi dengan berbagai alasan. Alasan yang disebutkan sesuai hasil kajian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah terhadap 14 propinsi dan 28 kabupaten/kota dalam Rachim (2013) adalah sebagai berikut:

- a. Alasan pelayanan, pemekaran daerah dianggap mampu meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat karena sistem birokrasi yang lebih kecil dibanding daerah induk yang memiliki cakupan pelayanan yang lebih luas.
- b. Alasan ekonomi, pemekaran daerah diharapkan dapat mempercepat pembangunan ekonomi daerah melalui pemanfaatan potensi lokal yang selama ini belum dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah induk.
- c. Alasan keadilan, pemekaran daerah dianggap mampu mendukung proses pemerataan pembangunan dalam hal ekonomi maupun pengisian jabatan publik sehingga suara masyarakat di daerah yang bersangkutan dapat terakomodasi dan tersampaikan dengan baik.
- d. Alasan anggaran, pemekaran daerah diharapkan dapat memberikan anggaran yang besar bagi daerah otonom baru untuk melakukan pembangunan di daerahnya.
- e. Alasan historis dan kultural.

Pelaksanaan pemekaran wilayah juga tidak dilakukan begitu saja melainkan terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang diharuskan untuk dipenuhi menurut Undang-undang No 32 Tahun 2004 adalah:

- a. Syarat administratif. Syarat administratif meliputi persetujuan DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi, persetujuan DPRD provinsi induk dan Gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.
- b. Syarat teknis. Syarat teknis meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, kemampuan keuangan, luas daerah, pertahanan, keamanan serta faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.
- c. Syarat fisik kewilayahan. Syarat ini berhubungan dengan wilayah yang akan dimekarkan, lokasi calon ibu kota serta sarana dan prasarana pemerintahan. Dalam pembentukan Provinsi, wilayah baru harus meliputi minimal lima kabupaten/kota dan dalam pembentukan Kota, wilayah baru harus meliputi minimal empat kecamatan.

Pemekaran wilayah Bojonegoro didasari alasan aspirasi masyarakat dan adanya peningkatan jumlah penduduk, proporsi jumlah desa, luas wilayah beberapa kecamatan serta untuk memperpendek rentang kendali penyelenggaraan pemerintah, pelayanan masyarakat guna mempercepat pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah, diperlukan penataan wilayah kecamatan dengan pembentukan Kecamatan (Perda Kabupaten Bojonegoro No 22 Tahun 2011). Sehingga dari alasan tersebut dibentuk Kecamatan Gayam.

Penelitian Terdahulu

Pemekaran wilayah sebagai keberlanjutan adanya otonomi daerah memang banyak terjadi di Indonesia. Sebagaimana dinyatakan oleh Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional dalam evaluasi dampak pemekaran wilayah tahun 2001-2007 diketahui bahwa pemekaran wilayah selama kurun waktu tersebut telah menambah jumlah provinsi mencapai 26,9% dan pada tingkat kabupaten/kota mencapai 45,2%. Dari fakta tersebut penelitian tentang pemekaran wilayah juga bertambah.

Rachim (2013) melakukan penelitian untuk mengevaluasi pemekaran wilayah Kota Serang ditinjau dari kinerja ekonomi dan kinerja pelayanan publik daerah. Analisis pada penelitian ini menggunakan metode indeksasi dengan indeks kinerja ekonomi meliputi komponen pertumbuhan PDRB, PDRB per kapita, rasio PDRB Kabupaten/Kota terhadap PDRB Provinsi dan angka kemiskinan dari tahun penelitian dan masing-masing daerah yang diteliti. Indeks pelayanan publik menggunakan komponen rasio siswa per sekolah, rasio siswa per guru ketersediaan fasilitas kesehatan, dan ketersediaan tenaga kesehatan. Dari penelitian ini yang ditinjau adalah dari cara mengevaluasi kinerja ekonomi yang menggunakan komponen PDRB namun penelitian berbeda dari tujuan yang ingin diteliti dan objek penelitian.

Anggi (2006) meneliti pertumbuhan ekonomi Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Barat periode sebelum dan sesudah pemekaran wilayah. Namun dalam penelitian Anggi ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis data *shift share*. Penelitian terkait pertumbuhan ekonomi juga dilihat dari beberapa sektor dengan diteliti pula kontribusi tiap sektor terhadap pembentukan PDRB. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pertumbuhan PDRB sebelum pemekaran wilayah adalah 0,15 sedangkan setelah pemekaran wilayah yaitu 0,20 dan sektor primer adalah penyumbang terkecil dalam PDRB.

Nurani (2013) meneliti dampak sosial ekonomi dari adanya pertambangan minyak dan gas di Banyu Urip dengan objek studi pada masyarakat Desa Gayam. Dampak ekonomi pada penelitian ini dilihat dari wawancara masyarakat terkait pendapatan masyarakat Gayam tersebut dan menunjukkan hasil ke arah yang lebih baik dan sejahtera. Secara logika pertumbuhan pendapatan masyarakat tersebut akan berdampak pada PDRB Kabupaten Bojonegoro sehingga diteliti pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro ditinjau dari PDRB Kabupaten Bojonegoro.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah dampak ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah dari adanya pemekaran wilayah pada daerah pertambangan terhadap masyarakat sekitar.

Sumber dan Jenis Data

Penelitian menggunakan data sekunder dan diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro yaitu:

- 1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bojonegoro sebelum dan sesudah terjadinya pemekaran wilayah yaitu sebelum adalah tahun 2010 dan sesudah pemekaran adalah tahun 2012.
- 2) Jenis pendapatan yang diterima dari kecamatan.

- 3) Pendapatan dari sektor pertambangan satu tahun sebelum dan sesudah terjadinya pemekaran wilayah Kecamatan Gayam.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi serta menggunakan data dokumentasi.

a. Wawancara

Menurut Hasan dalam Prastiwi dkk (2011) wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.

b. Observasi

Nasution dalam Sugiyono (2009: 64) mendeskripsikan observasi sebagai dasar semua ilmu pengetahuan. Hasan dalam Prastiwi dkk (2011) mengatakan bahwa observasi adalah bentuk metode penelitian melalui pengamatan langsung terhadap hal-hal yang terjadi di lokasi penelitian yang berkaitan dengan penelitian, yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung serta dapat dilakukan dengan proses perbandingan antara suatu fenomena dengan fenomena yang lain.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu data yang tidak langsung dari narasumber melainkan data yang telah diolah. Sugiyono (2009: 82) menyebutkan data dapat berbentuk tulisan, gambar dan karya. Data dalam penelitian ini adalah data pendapatan daerah yang telah diolah oleh Dinas Pendapatan Daerah.

d. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Sugiyono, 2009: 83).

Pengujian Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2009: 121) uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, kredibilitas data, *transferability*, *dependability*, *confirmability*.

a. Uji Kredibilitas Data

Uji kredibilitas data dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member *check*.

b. Uji *Transferability*

Dalam membuat laporan, peneliti harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya agar orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif.

c. Uji *Depenability*

Uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Caranya adalah pembimbing mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.

d. Uji *Confirmability*

Uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar

confirmability. Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* mirip dengan uji *dependability* sehingga dapat dilakukan secara bersamaan.

Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan adalah mengikuti konsep Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2009: 91) dimana dilakukan saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data diperoleh setelah melakukan pengamatan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro.

2. Reduksi data

Memilih data yang sesuai dengan fokus penelitian sehingga analisis akan lebih tajam pada permasalahan yang akan dibahas.

3. Penyajian data

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya sehingga data akan semakin mudah dipahami.

4. Penarikan kesimpulan

Mengungkapkan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian melalui reduksi dan penyajian data.

PEMBAHASAN

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bojonegoro

Sesuai pernyataan Badan Pusat Statistik bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari indikator Produk Domestik Bruto (PDRB), pertumbuhan

ekonomi Kabupaten Bojonegoro mengalami peningkatan tiap tahun selama tahun 2009 sampai tahun 2013. Kontribusi terbesar atas peningkatan PDRB tersebut sampai tahun 2013 masih dari sektor pertambangan dan penggalan. Sektor yang menunjukkan kontribusi besar setelah pertambangan dan galian sebelum tahun 2013 adalah dari sektor pertanian sedangkan pada tahun 2013 kontribusi kedua adalah dari sektor perdagangan, hotel dan restoran. Pertimbangan dalam melihat kontribusi persektor ini dilakukan karena pembentuk banyak faktor yang mempengaruhi PDRB.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bojonegoro (harga berlaku) berdasarkan lapangan usaha yang disampaikan oleh BPS Bojonegoro mengalami peningkatan 24,37% dari tahun 2010 ke 2011 saat terjadi pemekaran. Setelah pemekaran tahun 2012 terjadi peningkatan 8,79% dari tahun 2011. Tahun 2012 diukur dari tahun 2010 terjadi peningkatan sebesar 35,3%. Data PDRB berdasarkan lapangan usaha selama tiga tahun dari tahun 2010 samapi dengan 2012 tersebut disajikan sebagai berikut:

Tabel 3

PDRB Kabupaten Bojonegoro Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010–2012 (dalam milyar rupiah)

Lapangan Usaha	2010	2011	2012
Pertanian	4.812,75	5.244,04	5.873,52
Pertambangan dan Penggalan	8.520,62	12.235,59	12.625,58
Industri Pengolahan	1.312,59	1.531,57	1.771,56
Listrik, Gas, dan Air Bersih	106,58	121,47	132,15
Konstruksi/Bangunan	948,21	1.101,29	1.236,15

Perdagangan, Hotel, dan Restoran	3.096,11	3.554,99	4.092,26
Angkutan dan Komunikasi	736,85	824,62	940,17
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	816,76	925,93	1.066,80
Jasa – Jasa	1.854,88	2.076,29	2.304,99
Jumlah	22.205,36	27.615,79	30.043,18

Sumber : BPS Kabupaten Bojonegoro

Dari tabel diatas sektor pertambangan dan penggalian menunjukkan peningkatan 43,6% dari tahun 2010 ke tahun 2011 hal ini terjadi sebelum pemekaran wilayah sehingga keputusan pemekaran wilayah dilakukan pada saat PDRB Kabupaten Bojonegoro mengalami pertumbuhan yang signifikan.

Namun tahun 2012 sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan dimana dari tahun 2011 ke tahun 2012 hanya terjadi peningkatan 3,2% walaupun kontribusi terbesar PDRB Kabupaten Bojonegoro masih pada sektor pertambangan dan penggalian. Sedangkan dari dua sektor yang memberikan kontribusi terbesar setelah pertambangan dan penggalian mengalami kenaikan 9% dari tahun 2010 ke 2011 dan dari tahun 2011 ke tahun 2012 sebesar 12% pada sektor pertanian dan kenaikan 14,8% dan 15,1% ada sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Pada tahun 2013 sebagaimana catatan atas laporan keuangan Kabupaten Bojonegoro, perekonomian daerah tumbuh sebesar 5,68% yaitu dengan PDRB tahun 2013 sebesar Rp31,22 triliun dan tercatat Sektor Pertambangan dan Galian (Sektor Prima Migas) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 42,02 %, diikuti sektor-sektor Non Migas seperti Sektor Pertanian sebesar 19,55%; dan Sektor

Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR) tumbuh sebesar 13,62%, Sektor Industri Pengolahan sebesar 10,65%;. Sedangkan pada Sektor Pertanian (Sektor Primer Non Migas) justru mengalami penurunan pertumbuhannya yaitu dari 6,98 % tahun 2009 menjadi 4,52% di tahun 2013. Penurunan sektor pertanian dan kenaikan pada sektor perdagangan, hotel dan restoran tersebut dikarenakan setelah adanya pertambangan minyak di Kecamatan Gayam banyak pekerja dari luar Kabupaten Bojonegoro yang masuk dan memilih hotel sebagai tempat tinggal selama mereka berada di Kabupaten Bojonegoro sehingga terjadi peningkatan pada sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggi (2006) yang juga mempertimbangkan sektor lapangan usaha dimana masing-masing sektor memberikan kontribusinya pada PDRB. Sektor pertambangan dan penggalian sebagai penyumbang terbesar dalam PDRB Kabupaten Bojonegoro telah berkontribusi secara berturut-turut dari tahun 2010-2012 adalah sebesar 38%, 44% dan 42%.

2. Pendapatan Kabupaten Bojonegoro

Total pendapatan Kabupaten Bojonegoro dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 tercatat dalam Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2008 tercatat pendapatan total Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp891 milyar dan pada tahun 2014 telah mencapai Rp2 triliun. Sehingga selama tahun 2008 sampai dengan 2014 pendapatan Bojonegoro telah meningkat 1 triliun. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2010. Rincian pendapatan tersebut sebagai berikut:

Tabel 4**Total Pendapatan Kabupaten Bojonegoro (dalam Rupiah)**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Terhadap Target
2008	882.347.658.449	891.861.575.688	101%
2009	947.009.197.825	928.092.988.284	98%
2010	1.167.862.467.560	1.218.517.787.935	104%
2011	1.375.281.173.024	1.508.114.648.941	110%
2012	1.686.213.152.951	1.861.387.567.943	110%
2013	2.071.170.836.658	2.024.348.269.284	98%
2014	2.472.878.676.126	2.487.682.805.862	101%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro

Realisasi target yang melebihi 100% seiring dengan pertumbuhan pendapatan yang terjadi pada Kabupaten Bojonegoro. Sesuai dengan teori yang disampaikan Sukirno bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari perbandingan tahun yang dihitung pertumbuhannya dengan tahun sebelumnya sehingga diperoleh pada tahun 2008 dan 2009 pertumbuhan pendapatan sekitar kurang dari 10% tetapi mengalami pertumbuhan mencapai 31% pada tahun 2010. Pertumbuhan ini dikarenakan terdapat kenaikan dari Dana Bagi Hasil Minyak Bumi yaitu dari adanya pertambangan minyak yang terdapat di Kecamatan Gayam. Pencapaian pendapatan tersebut melebihi target pertumbuhan yang ditetapkan oleh Dispenda Kabupaten Bojonegoro dimana Dispenda menetapkan pertumbuhan 23%. Pada tahun 2011 dan 2012 pertumbuhan realisasi pendapatan adalah 24% dan 23%. Dari tahun 2012 ke tahun

2013 terjadi penurunan pertumbuhan pendapatan menjadi 9%. Hal ini dikarenakan terdapat penurunan dari penerimaan pajak daerah.

Berbeda dengan penerimaan pajak daerah, pendapatan DBH minyak bumi mengalami penurunan pada tahun 2011 yaitu dari 112% tahun 2010 hanya menjadi 28% namun kembali naik pada tahun 2012. Pada tahun 2011 terdapat proses pemekaran wilayah yang membutuhkan proses baik administrasi maupun terkait wilayah sehingga pendapatan dari Dana Bagi Hasil minyak bumi juga kurang maksimal. Namun penurunan DBH minyak bumi ini tidak terlalu berpengaruh terhadap pendapatan total Kabupaten Bojonegoro yang ditunjukkan pada tahun 2011 pendapatan total Kabupaten Bojonegoro justru mengalami pertumbuhan yang tinggi.

Dari total pendapatan Kabupaten Bojonegoro, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi kontribusi terbesar. Hal ini juga terlihat pada tahun 2013 realisasi PAD mencapai 105,53% dari anggaran sebesar Rp204.465.047.818 yaitu sebesar Rp215.766.157.632,20. Realisasi ini mengalami kenaikan 35,49% dibandingkan realisasi tahun 2012. Dari PAD tersebut diperoleh dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan terbesar dalam PAD tahun 2013 yaitu sebesar Rp104.526.643.950,07 dan pada tahun 2012 lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah sebesar Rp82.129.645.641,69.

Dari uraian diatas dalam tahun sebelum pemekaran sampai tahun setelah pemekaran yaitu dari tahun 2010-2012, pendapatan Kabupaten Bojonegoro terus mengalami kenaikan namun pertumbuhan pendapatan yang terjadi lebih

dipengaruhi dari sumber-sumber yang mendukung pendapatan tersebut. Secara umum masing-masing sumber pendapatan memiliki kontribusi tersendiri atas pendapatan total Kabupaten Bojonegoro, namun seiring dengan adanya pertambangan dan penggalian tersebut juga memiliki dampak yang cukup besar karena dampak yang timbul tidak hanya pada pendapatan DBH minyak bumi melainkan juga pada sosial ekonomi masyarakat yang lebih akan mengarah menambah lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dampak tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rochman, Hakim dan Nurani (2013) dimana menunjukkan dari adanya pertambangan minyak tidak membuat nilai sosial masyarakat berubah namun peningkatan pendapatan karena adanya alih pekerjaan yaitu dari awalnya bertani dan hasil tani tidak selalu menentumenjadi pekerja proyek yang memberikan hasil yang lebih stabil.

3. Penerimaan dari Kecamatan

Jenis pendapatan asli yang diterima dari kecamatan adalah tidak material dibandingkan dengan sumber pendapatan daerah yan lain. Begitu pula setelah adanya pemekaran wilayah yang menimbulkan Kecamatan Gayam sebagai kecamatan baru. Jenis pendapatan yang rata-rata diterima dari kecamatan adalah retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Undang-Undang Gangguan dan Retribusi Alat Berat. Pada Kabupaten Bojonegoro Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan penerimaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan dari kecamatan yang lain.

Dampak yang ditimbulkan dari adanya pemekaran wilayah tersebut adalah peningkatan IMB karena terdapat proses pembangunan yang cukup tinggi dari Kecamatan Gayam baik pembangunan bangunan-bangunan pemerintahan maupun bangunan proyek pertambangan minyak. Namun dari observasi yang dilakukan tidak disinggung adanya dampak yang besar dari pendapatan tersebut terhadap pendapatan total Kabupaten Bojonegoro. Secara keseluruhan pemekaran wilayah hanya berpengaruh pada pembagian pintu keluar masuk pendapatan dari awalnya ikut pada Kecamatan Kalitidu dan Ngasem namun sebagian beralih dari Kecamatan Gayam.

Dari uraian tersebut maka berdasarkan Perda Kabupaten Bojonegoro No 22 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kecamatan Gayam maka tujuan memperpendek rentang kendali penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat ini telah dapat dilakukan namun dalam kaitannya dengan guna mempercepat pertumbuhan ekonomi maka perlu pertimbangan lain yang harus diperhatikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan yang telah diuraikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bojonegoro dengan harga berlaku mengalami kenaikan dari tahun 2009 sampai tahun 2013 dengan kontribusi terbesar adalah pada sektor pertambangan dan penggalian dan kenaikan terbesar adalah pada tahun 2010. PDRB tidak dipengaruhi secara signifikan dengan adanya pemekaran wilayah di Kabupaten Bojonegoro.

Hal yang sama juga terjadi pada pendapatan total Kabupaten Bojonegoro dimana pertumbuhan pendapatan terjadi sepanjang tahun 2009-2014 namun perubahan yang signifikan pada pendapatan total Kabupaten Bojonegoro tidak semata karena pemekaran wilayah melainkan banyak faktor di antara lain sumber-sumber pendapatan daerah.

Pemekaran wilayah yang dilakukan dengan pembentukan Kecamatan Gayam berpengaruh terhadap pendapatan asli kecamatan yaitu salah satunya dari sumber pendapatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) namun tidak berkontribusi besar terhadap pendapatan total Kabupaten Bojonegoro. Pemekaran wilayah lebih berpengaruh pada penurunan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Saran

Sacara umum sektor pertambangan dan penggalian telah berpengaruh terhadap ekonomi maupun sosial Kabupaten Bojonegoro sehingga perlu adanya kontrol yang baik dari pemerintah agar Kabupaten Bojonegoro tetap terjaga baik dari segi lingkungan maupun kekhasan daerahnya.

Perlu dipertahankan pendapatan dari sektor pertanian karena sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Bojonegoro belum tentu berlangsung selamanya dan resiko yang ditimbulkan juga lebih tinggi dari dampak lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Mahardini, Anggi. 2006. "Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Barat Periode Sebelum dan Sesudah Pemekaran Wilayah". *Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor*.
- Nurani, Farida. dkk. 2013. *Dampak Sosial Ekonomi Pertambangan Minyak dan Gas Banyu Urip Kabupaten Bojonegoro*. Jurnal Administrasi Publik (JAP).Vol.1 No. 2.
- Prastiwi, Dewi dkk. 2011. Analisis Devolusi BPHTB menjadi Pajak Daerah dengan *Economic of Collection* Sebagai Tolok Ukur (Studi Kasus Kabupaten Madiun). *Akrual Jurnal Akuntansi* Vol.2 No.2. Tahun 2011.
- Rachim, Ratri Furry Pustika. 2013. *Evaluasi Pemekaran Wilayah Kota Serang Ditinjau dari Kinerja Ekonomi dan Kinerja Pelayanan Publik Daerah*. Skripsi Mahasiswa S-1. *Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro*.
- Sukirno, Sadono. 2011. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT Rajagrahindo Persada.
- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, CV.